

## **BAB II**

### **KEMARITIMAN INDONESIA**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya meraih kemakmuran diranah maritim. Dengan berbagai penggunaan kekuatan maupun diplomasi antar kerajaan yang ada di Indonesia pada zaman dahulu, sektor maritim dianggap penting untuk masa depan suatu bangsa. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah maritim di Indonesia, kebijakan poros maritim dunia serta tantangan implementasi kebijakan poros maritim dunia.

#### **A. Sejarah Maritim di Indonesia**

##### **1. Pra Kemerdekaan**

Sebelum masuknya era modern, kehidupan nenek moyang di Indonesia pada waktu itu sangat bergantung pada sektor pertanian atau hal-hal yang bersifat agraris. Berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki, menyebabkan banyak negara penjajah yang ingin menduduki Indonesia, terlebih lagi dengan mengambil hasil kekayaan alam yang ada. Sejarah menyebutkan bahwa sejak zaman kerajaan, kemaritiman di Indonesia memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan nenek moyang pada waktu itu. Segala bentuk aktivitas perdagangan maupun pelayaran dapat terkontrol dengan baik dan pada masa itu juga, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sangat disegani didunia internasional. Kerajaan-kerajaan yang pernah membangun kemaritiman Indonesia antara lain: Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Ternate.

##### **a. Kerajaan Kutai**

Berdasarkan letak geografisnya Kutai Kartanegara yang berpusat di Kutai Lama merupakan daerah lembab yang memiliki rawa-rawa terutama di sepanjang Sungai Mahakam, posisi kerajaan itu menjadi strategis karena dapat mengontrol lalu lintas perdagangan karena banyaknya para pedagang yang masuk dan keluar Kalimantan

melewati Sungai Mahakam (Rahmawan, 2014). Kegiatan perniagaan adalah salah satu aktivitas yang ditekuni masyarakat kutai, dengan menjual rempah-rempah serta kegiatan yang bersifat agraris menjadi pilihan utama. Kerajaan kutai merupakan kerajaan tertua yang pernah ada di Indonesia.

#### b. Kerajaan Sriwijaya

Salah satu kerajaan maritim yang besar dan terkenal di Nusantara pada waktu itu adalah kerajaan Sriwijaya yang berlangsung dari abad 7 M sampai 14 M. Dalam dunia perdagangan dan pelayaran, Sriwijaya berhasil menguasai hampir semua wilayah perairan di Nusantara antara lain laut Jawa, laut Banda, dan sebagian laut di wilayah Indonesia Timur. Di samping itu Sriwijaya juga menjalin hubungan dagang dengan India, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, China dan Philipina (Surowo, 2012).

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, kemaritiman Nusantara telah mencapai puncaknya, karena pada waktu itu Nusantara memiliki pelabuhan internasional yang hampir mendominasi segala aktivitas perdagangan dan pelayaran di wilayah barat hingga semenanjung malaya. Maritim Nusantara pada zaman dahulu yang dipegang oleh kerajaan Sriwijaya sangat disegani oleh pihak asing. Di tahun 1178, seorang penulis Cina, Chou K'u-fei melaporkan bahwa beberapa kapal asing yang lewat akan diserang jika tidak masuk pelabuhan Sriwijaya atau membayar tol (Yulianti, 2014).

#### c. Kerajaan Majapahit

Pada masa Kerajaan Majapahit, strategi untuk mempertahankan laut Indonesia dari ancaman negara lain sangat diperhatikan, dengan membangun armada-armada kapal yang dapat mencegah bahaya dari ancaman asing. Tradisi yang memperkuat Majapahit sebagai kerajaan maritim tergambar pada hubungan dagang dan misi diplomatik yang cukup luas. Sarana transportasi dan

pelabuhan juga menjadi pendukung sistem perdagangan maritim pada zaman Majapahit. Ekspedisi-ekspedisi dalam rangka perluasan wilayah tentunya juga dapat tergambarkan sebagai usaha kemajuan dalam bidang kelautannya (Wahyudi, 2013).

#### d. Kerajaan Ternate

Pada masa Kerajaan Ternate, aksivitas perdagangan di wilayah Maluku Utara tersebut mempromosikan rempah-rempah hingga ke benua eropa. Untuk menjaga sumber daya alam yang ada, Kerajaan Ternate membangun beberapa pelabuhan dan galangan kapal untuk mempermudah proses pengiriman dari pulau-pulau kecil ke pulau utama (Sinurat, 2016). Adanya benturan kepentingan serta perbedaan pendapat tidak menjatuhkan semangat kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu untuk memajukan Nusantara sebagai bangsa bahari.

## **2. Masa Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Indonesia**

Masa penjajahan Belanda di Indonesia dapat dibagi dalam dua periode yaitu periode tahun 1602 sampai 1799, dan periode tahun 1800 sampai 1942. Periode pertama yaitu antara tahun 1602 sampai 1799, Indonesia di bawah persekutuan dagang Belanda. Persekutuan dagang itu dibentuk tahun 1602, dan merupakan hasil penyatuan atau merger beberapa serikat dagang di Belanda. Serikat dagang ini bernama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) (Wiharyanto, 2007).

Setelah mengalami masa-masa kejayaan di bidang kemaritiman, Nusantara mulai mengalami kemunduran akibat masuknya serikat dagang tersebar di dunia yakni VOC Belanda. Mengingat Nusantara sebagai negara maritim yang letaknya strategis, hal ini dapat memudahkan Belanda untuk menguasai pasar internasional terutama di wilayah Asia. Selain itu Nusantara berada dibawah tekanan pemerintah Belanda yang memungkinkan Belanda dapat menguasai seluruh komponen maritim di Nusantara. Dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Nusantara. Untuk mendominasi

hal tersebut, VOC mengandalkan kekuatan militernya agar para pemimpin Nusantara pada waktu itu mau bekerjasama. Sistem kerjasama yang digunakan VOC adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk para pengusaha dan pemegang saham (Wiharyanto, 2007).

Layaknya sebuah negara, VOC memiliki hak istimewa dalam berpolitik. Hak istimewa tersebut antara lain hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang sendiri, hak mengumumkan perang, dan hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lain (Wiharyanto, 2007). Dengan hak tersebut VOC mampu mengontrol perdagangan dunia terutama di wilayah Asia. Terlebih lagi, VOC mendiskriminasi para pegawai yang termasuk orang-orang pribumi.

Kehadiran Belanda untuk menguasai pasar internasional berbasis maritim tidak berjalan lancar. Hal ini dikarenakan, adanya perlakuan tidak adil terhadap para pekerja serta korupsi dan sebagainya. Menurut (Nuswantoro, 2015) Setelah satu abad malang melintang di Indonesia, pada tahun 1799 VOC dibubarkan. Adapun sebab-sebab jatuhnya VOC antara lain karena korupsi yang merajalela di kalangan para pegawainya. Selain itu, banyak pegawainya yang tidak cakap. Kemuduran VOC saat melakukan monopoli perdagangan di Batavia saat itu yang sekarang menjadi Jakarta telah meniggalkan sejarah yang kelam untuk Nusanatara terutama dari bidang maritim. Adapun sebab-sebab jatuhnya VOC menurut (Wiharyanto, 2007) :

a. Membeli murah, menjual mahal

Yang dimaksud dengan membeli murah menjual mahal adalah, setiap hasil bumi atau bahan baku yang dihasilkan orang-orang Indonesia dibeli oleh Belanda dengan harga yang murah. Setelah itu, Belanda mengolah hasil bumi tersebut dan menjualnya lagi kepada orang-orang Indonesia dengan harga yang mahal.

b. Menjaga jumlah barang yang dimonopoli

Belanda terus melakukan upaya menjaga barang yang dimonopoli agar tetap seimbang. Belanda tidak ingin barang mereka dibeli dengan harga yang rendah. Ketika permintaan pasar menjadi banyak, Belanda rela mengeluarkan semua pengeluarannya. Akan tetapi, jika permintaan pasar menjadi lebih sedikit, barang yang sudah diproduksi maupun belum diproduksi akan dimusnahkan.

c. Kerja paksa

Belanda menganut sistem kerjapaksa seperti yang digunakan para penjajah untuk menduduki Indonesia pada zaman dahulu.

d. Menjaga monopoli tanaman

Di samping menjaga stok barang, Belanda juga menjaga tanaman-tanaman agar hasilnya tidak melebihi permintaan pasar, terutama tanaman rempah-rempah di Maluku, gula dari Jawa dan lada dari Aceh. Dengan mengandalkan kekuatan militernya, Belanda melakukan pelayaran disetiap pulau yang menghasilkan rempah-rempah di Nusantara, setelah itu memusnahkan hasil rempah-rempah tersebut yang dianggap melanggar aturan.

### **3. Pasca Kemerdekaan**

Dalam arti luas, laut merupakan sumber kehidupan manusia. Pada kenyataannya, laut tidak hanya sebagai sumber namun sebagai penghubung suatu wilayah/negara. Setelah mengalami sejarah yang panjang terkait kemaritiman, pasca kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai membangun kembali budaya maritim yang pernah ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi/menjaga setiap kekayaan alam laut yang ada di Indonesia.

Perjuangan Djuanda dalam mengatur ulang kebijakan maritim yang disusun oleh pemerintah Belanda yaitu Ordonantie 1939 menetapkan batas laut teritorial Indonesia

hanya selebar 3mil telah membuah hasil menjadi 12 mil. Saat itu Indonesia menggunakan “*asas archipelago state*” sebagai dasar hukum laut. Mengutip (Kemenpar, 2009) Sejak 1 Agustus 1957, Ir. Djuanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran ‘asas archipelago’ yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1951 seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya namun tidak berani untuk menerapkannya dalam hukum laut Indonesia. Sebagai alternatif terhadap RUU itu, disusun konsep ‘asas negara kepulauan’.

Adapun beberapa kebijakan dan eksistensi pemerintah Indonesia dalam hal kemaritiman sebelum era Presiden Joko Widodo:

a. Era Presiden Soekarno

Sebagai Presiden pertama yang memimpin Indonesia dan memiliki konsentrasi yang mendalam di dunia maritim, mantan Presiden Soekarno mengemukakan beberapa kebijakan-kebijakan terkait kemaritiman untuk memperkuat wilayah maritim Indonesia. Mengutip Paongan (Paongan, 2014), Pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau di dalamnya, dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan wilayah NKRI.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention of the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang hukum laut). UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan formal dari dunia terhadap kedaulatan NKRI sebagai negara kepulauan dan mulai berlaku sebagai hukum positif sejak 16 November 1994. Artinya, butuh 37 tahun Deklarasi Djuanda diakui oleh

dunia internasional. Deklarasi Djuanda menjadikan luas perairan NKRI mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup> (belum termasuk perairan ZEE). Panjang garis pantainya mencapai 81.497 km<sup>2</sup>, merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta km<sup>2</sup> atau 81% dari luas wilayah Indonesia keseluruhan (Paongan, 2014). Dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982, Indonesia dapat menjalankan kepentingan-kepentingannya di laut serta dapat mempertahankan hak dan kedaulatan sebagai negara maritim.

#### b. Era Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ada banyak kebijakan yang dihasilkan (Khair, 2015). Diantaranya: Presiden Soeharto mengeluarkan UU nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya pada 30 September 1996 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 77 tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional yang langsung diketuai oleh Presiden sendiri.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, banyak yang berpendapat bahwa pembangunan Indonesia saat itu berorientasi di darat dan fokus terhadap hal-hal yang bersifat agraris. Namun kenyataannya, ada banyak kebijakan maritim yang di buat oleh Presiden Soeharto termasuk penegakan

keamanan wilayah NKRI di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

c. Era Presiden B.J Habibie

Dengan adanya Wawasan Nusantara atau dikenal dengan deklarasi Djuanda, tiap-tiap Presiden yang pernah menjabat di Indonesia melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Soekarno pada zaman itu. Presiden Habibie mengusung Deklarasi Bunaken sebagai pemahaman mengenai budaya maritim yang ada di Indonesia. Mengutip (Devia, 2015) pada 18 Desember 1996 di Makasar, Sulawesi Selatan, BJ Habibie sebagai Menristek membacakan pidato Presiden RI yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”. Selanjutnya pada tahun 1998 Presiden BJ Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam “Deklarasi Bunaken”. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.

d. Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Presiden Gus Dur membuat kebijakan terkait kemaritiman, dengan membentuk departemen kelautan atau yang dikenal sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Presiden Gus Dur berpandangan, laut Indonesia butuh pengelolaan perikanan/budi daya perikanan yang secara bertahap mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Laut seluas Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, maka dari itu dibutuhkannya departemen kelautan untuk melanjutkan visi dari pada Presiden-presiden sebelumnya.

Mengutip Khair (Khair, 2015) Di era pemerintahan Gus Dur, 2 tahun sebelumnya mengeluarkan kebijakan membentuk kementerian baru yakni Departemen Eksplorasi Laut dengan Keputusan



Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Dalam perjalanannya, namanya berubah-ubah dan akhirnya saat ini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden No.47 tahun 2009. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga dibentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan kelautan di Indonesia.

e. Era Presiden Megawati Soekarnoputri

Di era Presiden Megawati mengeluarkan kebijakan mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Pada dasarnya kebijakan ini mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan kekayaan alam laut Indonesia yang berlimpah. Presiden Megawati menyerukan Seruan Sunda Kelapa sebagai pengingat untuk masyarakat Indonesia. Mengutip Khair (Khair, 2015) Pemerintahan Megawati melalui menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri telah mengeluarkan peraturan Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

Pada tanggal 27 Desember 2001, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, Presiden RI Megawati Sukarnoputri pada waktu itu telah mencanangkan “Seruan Sunda Kelapa”. Seruan tersebut mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam.

f. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Sementara pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan nasional yang terkait dengan bidang kelautan, yakni mengganti

nomenklatur Dewan Maritim Indonesia (DMI) menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2007, ditetapkan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 yang memuat pembangunan bidang kelautan, dan menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia atau *World Ocean Conference* (WOC) di Manado pada bulan Mei 2009 (Khair, 2015).

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan berbasis maritim tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan fokus/perhatian pemerintah pada saat itu pada pembangunan ekonomi dan diplomasi antar negara. Namun ada beberapa kebijakan kemaritiman yang dihasilkan sebagai wujud kesadaran akan laut Indonesia.

## **B. Kebijakan Maritim Era Presiden Joko Widodo**

Pada 13 Desember 1957, Djuanda mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Deklarasi ini bertujuan untuk memulihkan kemaritiman Indonesia dari kerusakan-kerusakan pada masa kolonialisme. Keberhasilan Djuanda memperjuangkan Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional sebagai negara kepulauan telah tercantum di dalam UNCLOS 1982.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki kepentingan sebagaimana negara maritim lainnya, Indonesia butuh kebijakan maritim yang kuat untuk dapat menangani permasalahan-permasalahan terkait kemaritiman. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan poros maritim dunia yang bertujuan untuk menguatkan kembali potensi kemaritiman Indonesia. Kebijakan ini merupakan refleksi dari cara pandang/sikap tentang geografis Indonesia pada masa Presiden Soekarno yakni wawasan nusantara. Mengutip Kemlu (Kemlu, 2014) Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodo menegaskan

konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

- 1) Membangun kembali budaya maritim Indonesia
- 2) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
- 3) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- 4) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
- 5) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

### **C. Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019**

Keseriusan pemerintah untuk mewujudkan poros maritim dunia telah dijelaskan didalam pilar-pilarnya. Berdasarkan situs resmi tentang kebijakan kelautan Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia , 2017) terdapat sebelas pilar kebijakan kelautan Indonesia:

#### **1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari;
- b) Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta dan keselamatan produk kelautan dan perikanan.

- c) Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik.
- d) Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan.
- e) Pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam non konvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan.
- f) Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan.
- g) Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati.
- h) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan.
- i) Penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan.

## **2. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut:

- a) Peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.
- b) Pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan.
- c) Peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, pengembangan sistem informasi kelautan, peningkatan gizi masyarakat kelautan.
- d) Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.
- e) Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.

- f) Penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan.
- g) Peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan.
- h) Penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan.
- i) Pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan.
- j) Peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan.
- k) Peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi.
- l) Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis.

### **3. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, sebagai berikut:

- a) Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proposional dengan luas wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan.
- b) Peningkatan kemampuan dan kineja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, sertadi luar wilayah yuridiksi sesuai dengan hukum internasional.
- c) Peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar.
- d) Peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama pertahanan dan keamanan laut baik ditingkat regional maupun internasional.

- e) Penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
- f) Optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian.
- g) Pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya belanegara.
- h) Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.

#### **4. Tata kelola dan Kelembagaan Laut**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan tata kelola kelautan, sebagai berikut:

- a) Penataan sistem hukum nasional dibidang kelautan.
- b) Implementasi hukum intemasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional.
- c) Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggungjawab.

#### **5. Ekonomi Kelautan**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan ekonomi kelautan, sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan.
- b) Penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien.
- c) Pengembangan dunia usaha dibidang kelautan nasional yang berdaya saing intemasional.
- d) Pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis.
- e) Optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan.
- f) Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran.

- g) Pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.
- h) Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan.

## **6. Infrastruktur Kelautan**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan infrastruktur kelautan, sebagai berikut:

- a) Sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan.
- b) Pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional.
- c) Pengembangan kemampuan dan kapasitas badan usaha nasional di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kelautan yang berdaya saing dan bertaraf internasional.
- d) Peningkatan kemampuan sumber pendanaan nasional untuk pembangunan infrastruktur kelautan.
- e) Penciptaan iklim investasi yang baik untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur maritim.
- f) Peningkatan kerjasama investasi pembangunan infrastruktur dengan negara-negara mitra.
- g) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut.

## **7. Peningkatan Kesejahteraan**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan peningkatan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a) Pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
- b) Peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
- c) Penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
- d) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari.
- e) Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **8. Pengelolaan Ruang Laut**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pengelolaan ruang laut, sebagai berikut:

- a) Penciptaan keterpaduan lintas program antarsektor di wilayah laut.
- b) Percepatan penetapan rencana tata ruang laut nasional.
- c) Percepatan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d) Percepatan penyelesaian rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.
- e) Penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut.



- f) Penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang laut.

## **9. Perlindungan Lingkungan Laut**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan perlindungan lingkungan laut, sebagai berikut:

- a) Penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan.
- b) Penguatan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik.
- c) Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak.
- d) Pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.
- e) Penanggulangan bencana kelautan.
- f) Pengembangan tata guna dan infrastruktur pesisir dan laut yang berkelanjutan.
- g) Pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan global di bidang pengelolaan lingkungan laut.

## **10. Budaya Bahari**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan budaya bahari, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b) Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional.
- c) Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari.
- d) Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari.
- e) Mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan peran kota- kota pelabuhan bersejarah.

## **11. Diplomasi Maritim**

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:

- a) Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
- b) Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan.
- c) Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan.
- d) Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga.
- e) Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional.
- f) Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan.
- g) Pembakuan nama pulau.

### **D. Tantangan Implementasi Kebijakan Poros Maritim Dunia**

Poros maritim dunia adalah sebuah komitmen Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia lewat pembangunan maritim agar kemaritiman Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maritim lainnya. Indonesia dinggap mampu menjadi poros maritim dunia dilihat dari besar dan luasnya laut Indonesia serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, namun hal ini bertentangan dengan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola kemaritiman yang ada di Indonesia.

Menurut beberapa para ahli mengatakan bahwa kebijakan poros kemaritiman dunia yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo masih belum jelas. Mengutip (Wahyuni, 2016) Pakar Hukum Maritim Internasional, Chandra Motik, menambahkan pembangunan poros maritim ini juga belum mempunyai landasan hukum yang jelas dalam eksekusinya.

Indonesia belum memiliki Undang-Undang maritim. Saat ini Indonesia hanya memiliki Undang-Undang pelayaran yang merupakan bagian kecil dari persoalan maritim. Dengan adanya Undang-Undang maritim yang secara rinci mengatur segala bentuk aktivitas yang ada di laut serta diatas laut, Indonesia akan mampu menjalankan setiap kepentingannya di laut.

Namun hal yang paling mendasar dalam proses penerapan kebijakan ini adalah kemampuan Indonesia dalam menciptakan teknologi berbasis maritim. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain mengenai teknologi kemaritiman. Menurut Jamaluddin (FMB, 2014) Maritim Indonesia tidak maju karena teknologi masih tertinggal dari negara lain. Dengan memiliki teknologi yang canggih, Indonesia di upayakan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait kemaritiman. Tidak hanya itu, Indonesia juga mampu memanfaatkan sumber daya laut dengan baik. Mulai dari perikanan, industri galangan kapal, pemantauan cuaca, dan sebagainya. Dewasa ini, pengelolaan sumber daya laut di Indonesia terbilang sangat buruk. Menurut (Kabarbisnis, 2017) Industri perikanan di Indonesia masih memerlukan fasilitas gudang berpendingin berkapasitas 275.000 ton guna mengantisipasi membludaknya ikan hasil tangkapan nelayan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memberikan peluang untuk investor dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) juga merupakan suatu tantangan untuk Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dengan adanya ALKI, aktor-aktor negara maupun non-negara bebas masuk ke perairan Indonesia yang memiliki berbagai macam kepentingan. ALKI memiliki nilai strategis bagi negara-negara yang berkepentingan atau memiliki aksi tertentu dalam menjalankan kepentingan di laut.